

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa pengadaan barang/jasa perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa mempunyai peran dalam peningkatan pelayanan publik; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang	a. bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa mempunyai peran dalam peningkatan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terkait pelaksanaan serta perubahan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;

<p>Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

<p>Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Lembaran Daerah Rota Pekalongan Tahun 2018 Nornor 15),</p>	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);</p>
--	---

	8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 15);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

<p>3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirtayasa.</p> <p>4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan,</p> <p>5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas</p> <p>6. Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa.</p> <p>7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>8. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan yang dibiayai dengan anggaran Perumda Tirtayasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.</p>	<p>3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa.</p> <p>4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut Perumda Tirtayasa adalah Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan.</p> <p>5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</p> <p>6. Direktur adalah Direktur Perumda Tirtayasa.</p> <p>7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>8. Pengadaan Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan yang dibiayai dengan anggaran Perumda Tirtayasa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.</p>
---	---

<p>9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Tirtayasa.</p> <p>10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa.</p> <p>11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Sub Bagian Umum di Perumda Tirtayasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>12. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.</p> <p>13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.</p> <p>14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>	<p>9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Tirtayasa.</p> <p>10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa.</p> <p>11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>12. Tim Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Tim Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur untuk mengelola pemilihan Penyedia.</p> <p>13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.</p> <p>14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang seluruh pekerjaan Pengadaan melaksanakan sebagian atau Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perumda Tirtayasa sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p> <p>15. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.</p>
--	--

<p>16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perumda Tirtayasa sebagai pihak pemberi pekerjaan.</p> <p>17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.</p> <p>18. Pengelola pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direktur untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.</p> <p>19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasayang akan dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa.</p> <p>20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronikyang disediakan untuk memenuhi kcbutuhan barang/jasa Perumda Tirtayasa.</p> <p>21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.</p> <p>22. Satuan Pengawas Internyang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiev, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perumda Tirtayasa.</p> <p>23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelolayang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan</p>	<p>16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Direktur untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>17. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa.</p> <p>18. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Perumda Tirtayasa.</p> <p>19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.</p> <p>20. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perumda Tirtayasa.</p> <p>21. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda Tirtayasa, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.</p> <p>22. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah secara organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam</p>
---	--

<p>sendiri oleh Perumda Tirtayasa, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.</p> <p>24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p> <p>25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Perumda Tirtayasa.</p> <p>26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.</p> <p>27. Pelaku Usaha adalah setiap Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>28. Penyedia Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.</p>	<p>pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p> <p>23. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Perumda Tirtayasa.</p> <p>24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.</p> <p>25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>26. Penyedia Barang/Jasa Perumda Tirtayasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.</p> <p>27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.</p> <p>28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p>
---	---

<p>29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,</p> <p>30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.</p> <p>32. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.</p> <p>33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK,</p> <p>34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.</p>	<p>29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.</p> <p>30. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.</p> <p>31. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.</p> <p>32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.</p> <p>33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.</p> <p>34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.</p> <p>35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.</p>
--	---

<p>35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.</p> <p>36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.</p> <p>37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.</p> <p>38. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.</p> <p>39. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus puluh juta rupiah).</p> <p>40. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus puluh juta rupiah).</p> <p>41. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.</p> <p>42. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.</p>	<p>36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.</p> <p>37. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>38. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>39. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.</p> <p>40. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.</p> <p>41. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.</p> <p>42. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan</p>
---	--

<p>43. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.</p> <p>44. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>45. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>46. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>47. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan</p>	<p>merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>44. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>45. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.</p> <p>46. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>47. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara</p>
---	--

<p>Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.</p> <p>48. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>49. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Perumda Tirtayasa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.</p> <p>50. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.</p> <p>51. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p> <p>52. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.</p>	<p>ekonomis tidak hanya untuk Perumda Tirtayasa sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.</p> <p>48. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.</p> <p>49. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.</p>
	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2

<p>Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Walikota ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa; b. Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/ atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Perumda Tirtayasa; dan/atau c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. 	<p>Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Perumda Tirtayasa; dan/atau c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran Perumda Tirtayasa sebagaimana dimaksud huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Walikota ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya. <p>(2) pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Swakelola; dan/ atau b. Penyedia. 	

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA	
Bagian Kesatu Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b. meningkatkan penggunaan pmduk dalam negeri; c. meningkatkan nilai tambah Perumda Tirtayasa; d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan; e. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; f. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; dan g. mendorong pengadaan Berkelanjutan. 	
Bagian Kedua Kebijakan pengadaan Barang/Jasa	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. c. memperkuat kapasitas sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa; d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan h. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 	
<p>Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel. 	
<p>Bagian Keempat</p>	

Etika Pengadaan Barang/Jasa	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait, e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kerugian keuangan Perumda Tirtayasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan 	

<p>h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur, Dewan Pengawas, atau personel inti pada Perumda Tirtayasa, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama; b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana; d. PPK/Tim Pengadaan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 	
---	--

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA	
Bagian Kesatu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	
	3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b. PPK; c. Pejabat Pengadaan; d. Tim Pengadaan; e. Agen Pengadaan; f. PjPHP/PPHP; g. Penyelenggara Swakelola; dan h. Penyedia.	Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. PA; b. PPK; c. Pejabat Pengadaan; d. Pokja Pemilihan; e. Agen Pengadaan; f. Penyelenggara Swakelola; dan g. Penyedia.
Bagian Kedua Pengguna Anggaran	
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9 PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Tirtayasa; b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain;	Pasal 9 PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

<ul style="list-style-type: none"> c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang g. menetapkan PPK; h. menetapkan Pejabat pengadaan; i. menetapkan PjPHP/PPHP; j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; k. menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui l. Sayembara/ Kontes; m. menyatakan Tender gagal/ Seleksi gagal; dan n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas (sepuluh miliar rupiah); atau 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; c. menetapkan perencanaan pengadaan; d. menetapkan dan mengumumkan RUP; e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; h. menetapkan PPK; i. menetapkan Pejabat Pengadaan; j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; k. menetapkan tim teknis; l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
<p>Bagian Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen</p>	

Pasal 10

- (1) PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.

<p>(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. <p>(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.</p>	
<p>Bagian Keempat Pejabat Pengadaan</p>	
	<p>5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya Yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan melaksanakan E-purchasing Yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling sedikit Rp300.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

<p>Bagian Kelima Tim Pengadaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tim Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). <p>(2) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia anggotaTim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.</p> <p>(4) Tim Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.</p>	
<p>Bagian Keenam</p>	

Agen Pengadaan	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Tim Pengadaan dan/atau PPK.</p> <p>(3) Pelaksanaan tugas Tim pengadaan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Direktur.</p>	
Bagian Ketujuh Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas (dua ratus juta rupiah).</p>	6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

<p>Bagian Kedelapan Penyelenggara Swakelola</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.</p> <p>(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya,</p> <p>(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.</p> <p>(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.</p>	
<p>Bagian Kesembilan Penyedia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h waiib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p> <p>(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 	

<p>d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.</p>	
<p>BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penctapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari anggaran Perumda Tirtayasa dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perumda Tirtayasa.</p> <p>(3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. <p>(4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan tipe Swakelola; b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB). <p>(5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Tirtayasa; 	

<p>b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perumda Tirtayasa dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;</p> <p>c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perumda Tirtayasa dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau</p> <p>d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan Oleh Perumda Tirtayasa dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi Oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.</p> <p>(6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan spesifikasi teknis/ KAK; penyusunan perkiraan biaya/RAB; pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan penyusunan biaya pendukung. <p>(7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam RUP.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan produk dalam negeri; 	

<p>b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.</p> <p>(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:</p> <p>a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik.</p> <p>(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.</p>	
<p>Bagian Ketiga Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:</p> <p>a. keluaran atau hasil; b. volume barang/jasa; c. ketersediaan barang/jasa; d. kemampuan Pelaku Usaha; e. keterbatasan tempat penyimpanan barang/jasa; dan/ atau f. ketersediaan anggaran Perumda Tirtayasa.</p> <p>(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/dasa, dilarang:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasayang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi. 	
<p>Bagian Keempat Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/JaSa dilakukan pada tahap perencanaaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, dan /atau persiapan pemilihan Penyedia. (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/ PPK dan/atau UKPBJ 	
<p>Bagian Kelima Pengumuman Rencana Umum Pengadaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pengumuman RUP Perumda Tirtayasa dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran Perumda Tirtayasa disetujui Oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Walikota. (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan/atau Situs web Pcrumda Tirtayasa, papan 	

<p>pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, clan/ atau media lainnya.</p> <p>(3) Pengumuman RUP dilakukan kernbali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau RKAP.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Persiapan Swakelola</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, fencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.</p> <p>(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Oleh PA.</p> <p>(3) Penetapan Penyelcnggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan Oleh PA; b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA, serta Timm Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau 	

<p>d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.</p> <p>(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.</p> <p>(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.</p> <p>(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/ sub kegiatan/output.</p> <p>(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Persiapan Pengadaan Barang/JaSa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:</p> <p>a. menetapkan HPS;</p> <p>b. menetapkan rancangan kontrak;</p>	

<p>c. menetapkan spesifikasi teknis/ KAK; dan/atau</p> <p>d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).</p> <p>(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.</p> <p>(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>(5) HPS digunakan sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, <p>(6) HPS tidak menjadi dasaf perhitungan besaran kerugian Perumda Tirtayasa.</p>	

<p>(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.</p> <p>(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lumsum; b. Harga Satuan; c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; d. Terima Jadi (Turnkey); dan e. Kontrak Payung. <p>(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung. <p>(3) Kontrak Lumsum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan</p>	

<p>dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;b. berorientasi kepada keluaran; danc. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran Yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak. <p>(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan Yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu Yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada Saat Kontrak ditandatangani;b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; danc. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. <p>(5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.</p> <p>(6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</p>	
--	--

<p>atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak. <p>(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa Yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.</p> <p>(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.</p> <p>(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota dengan ketentuan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun. 	
--	--

	7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Kontrak terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. bukti pembelian /pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan. 2. Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/JasaLainnya dengan nilai paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 3. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 4. SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp (tiga ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 5. Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp (tiga ratusjuta rupiah) 	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bentuk Kontrak terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. bukti pembelian/pembayaran; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan. (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar (5) rupiah). (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

<p>dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>6. Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.</p> <p>7. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam Peraturan Direktur.</p>	<p>Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai (6) paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian (7) melalui toko daring.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam Peraturan Direktur.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kon trak Tahun Jamal'. <p>(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jaminan Penawaran; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. Jaminan Sanggah Banding; c. Jaminan Pelaksanaan; d. Jaminan Uang Muka; dan e. Jaminan Pemeliharaan. <p>(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.</p> <p>(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak bersyarat; b. b, mudah dicairkan; dan c. harus dicairkan oleh penerbit jarninan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Tim Pengadaan/PPK/Pihak yang diberi kuasa ole-h Tim Pengadaan/PPK diterima. <p>(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan,</p> <p>(6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang</p>	
--	--

<p>undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.</p> <p>(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk surety-ship di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas RP 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (Satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.</p> <p>(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.</p>	

<p>(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (Satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.</p>	
	<p>8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas RP 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. <p>(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. <p>(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. <p>(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS. <p>(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:</p>

<p>a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau</p> <p>b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.</p> <p>(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p>a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau</p> <p>b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.</p> <p>(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.</p> <p>(2) Nilai Jaminan (Jang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).</p>	

<p>(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.</p> <p>(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hinggajangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.</p> <p>(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasai 36</p> <p>(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pernilaian dan/ atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak. <p>(2) Persyaratan dan tata cara pcnghitungan pcnyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya Icbih dari 18 (delapan belas) bulan; b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan ; c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercanturn dalam penawaran; d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang terca_ntum dalam Kontrak; e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan Oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. 	
	9. Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37	Pasal 37

<p>(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; dan d. Tender. <p>(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.</p> <p>(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.</p> <p>(5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(6) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Perumda Tirtayasa. 	<p>(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; dan d. Tender. <p>(2) E-purchasing dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.</p> <p>(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.</p> <p>(5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Perumda Tirtayasa; b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
--	--

<p>b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan Yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;</p> <p>c. C. Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Yang hanya dapat disediakan Oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;</p> <p>d. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan Oleh pemegang hak paten, atau pihak Yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak Yang menjadi pcmenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau</p> <p>e. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.</p> <p>(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.</p>	<p>kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;</p> <p>c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;</p> <p>d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau</p> <p>e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.</p> <p>(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:</p> <p>a. Sistem Nilai;</p> <p>b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau</p> <p>c. Harga Terendah.</p>	

<p>(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.</p> <p>(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai Sisa dalam jangka waktu oprasi tertentu.</p> <p>(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.</p>	
	10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) file; b. 2 (dua) file; atau c. 2 (dua) tahap. <p>(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah yang bernilai diatas RP 300.000.000 (tiga ratus</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) file; b. 2 (dua) file; atau c. 2 (dua) tahap. <p>(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.</p>

<p>juta rupiah) dan paling banyak RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).</p> <p>(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.</p> <p>(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; b, mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau mebutuhkan penyetaraan teknis. 	<p>(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.</p> <p>(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; mungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau mebutuhkan penyetaraan teknis.
	<p>11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleksi; Pengadaan Langsung; dan Penunjukan Langsung. <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleksi; Pengadaan Langsung; dan Penunjukan Langsung. <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>

<p>(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Qyat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.</p> <p>(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama. 	<p>(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.</p> <p>(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan Biaya; 	

<p>b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.</p> <p>(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.</p> <p>(3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.</p> <p>(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.</p> <p>(5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.</p> <p>(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>	

<p>(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.</p> <p>(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.</p> <p>(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. <p>(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.</p> <p>(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/JaSa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/ Jasa Lainnya. <p>(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 	
---	--

<p>b. Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.</p> <p>(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:</p> <p>a. daftar peSerta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/JaSa Lainnya; atau</p> <p>b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.</p> <p>(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.</p> <p>(9) Tim Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi Yang diskriminatif dan tidak objektif.</p> <p>(10) Pengadaan Barang/Jasa Yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan Yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Tim Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Dokumen Pernilaian terdiri atas:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung. 	
<p>BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA</p>	
<p>Bagian Kesatu Pelaksanaan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan Sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dan/ atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 500/0 (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. <p>(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PA melakukan kesepakatan kerja dengan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah pelaksana Swakelola; dan 	

<p>b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.</p> <p>(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.</p> <p>(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud Pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantun dalam Kontrak Sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembayaran Swakelola</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengawasan dan Pertanggungjawaban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.</p> <p>(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.</p>	

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.	
BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA	
Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	
Pasal 49	
<p>(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah <p>(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.</p>	

<p>(4) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/ jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Perumda Tirtayasa Yang ditetapkan Oleh Direktur.</p> <p>(5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.</p> <p>(6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembelian/ pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK. <p>(7) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.</p> <p>(8) Untuk barang/jasa Yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan RKAP Perumda Tirtayasa.</p> <p>(9) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.</p> <p>(10) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-rverse Auction)</p>	
<p>Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal</p>	

Pasal 50

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
- a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - f. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/
 - g. Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan Tim Pengadaan/ PPK.
- (3) prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan Oleh Tim Pengadaan.
- (4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh P.A.

<p>(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (L), Tim Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, procs Tender/ Seleksi dilanjutkan; atau b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta Yang lulus 1 (Satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung. <p>(6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengadaan segera melakukan.'</p> <ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penawaran ulang; b. penyampaian penawaran ulang; atau c. Tender/ Seleksi ulang. <p>(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.</p> <p>(8) Penyampaian penawaran mang Sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.</p> <p>(9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hurufc, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.</p> <p>(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Tim Pengadaan dengan persetujuan PA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:</p>	
--	--

<ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi. 	
<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. Penandatanganan Kontrak; c. Pemberian uang muka; d. Pembayaran prestasi pekerjaan; e. Peru bahan Kontrak; f. Penyesuaian harga; g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; h. Pemutusan Kontrak; i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau j. Penanganan Keadaan Kahar. <p>(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran Perumda Tirtayasa.</p>	
<p>Bagian Keempat Pembayaran Prestasi Pekerjaan</p>	
<p>Pasal 52</p>	

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pereliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya,(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none">a. pembayaran bulanan;b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atauc. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak. | |
|--|--|

<p>(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Perubahan Kontrak</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi telmis/ KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. <p>(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Keadaan Kahar</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>	

<p>(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.</p> <p>(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati 1 (satu) Tahun.</p> <p>(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.</p>	
<p>Bagian Ketujuh Penyelesaian Kontrak</p>	
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.</p> <p>(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun yang bersangkutan.</p>	
<p>Bagian Kedelapan</p>	

Serah Terima Hasil Pekerjaan	
Pasal 56	
<p>(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengQiuikan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.</p> <p>(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.</p> <p>(3) FPK dan Penyedia menandatangani Berit_a Acara Serah Terima.</p>	
	12. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 57	Pasal 57
<p>(1) PPKmenyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada PA.</p> <p>(2) PA meminta PjPHP/PPHP untuk -melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.</p> <p>(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara,</p>	<p>(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada PA/KPA.</p> <p>(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterangkan dalam berita acara.</p>
BAB VIII	
PENGADAAN KHUSUS	
Bagian Kesatu	
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat	
Pasal 58	

<p>(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.</p> <p>(2) Keadaan darurat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial; dan b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Perumda Tirtayasa. <p>(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.</p> <p>(4) Untuk Penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.</p> <p>(5) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.</p> <p>(6) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan d arurat.</p>	
<p>Bagian Kedua Pengecualian</p>	
<p>Pasal 59</p> <p>(1) Dikecualikan dari ketentuan dala_m Peraturan Walikota ini adalah:</p>	

<p>a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipu blikasikan secara luas kepada masyarakat;</p> <p>b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau</p> <p>c. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p>Tender/ Seleksi Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.</p> <p>(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement).</p> <p>(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX</p>	

<p style="text-align: center;">USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA memperluas peran serta usaha kecil.</p> <p>(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.</p> <p>(4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak RP 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.</p> <p>(5) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Redua Penggunaan produk Dalam Negeri</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Perumda Tirtayasa wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.</p> <p>(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat pesertayang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).</p> <p>(3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.</p> <p>(5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. <p>(6) LKPP dan/ atau Perumda Tirtayasa memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.</p>	

<p>(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas RPI 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) ,</p> <p>(5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7 ,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.</p> <p>(6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.</p> <p>(7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).</p> <p>(8) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan: $KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$</p> <p>KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.</p>	
<p>Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pengadaan Barany Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.</p> <p>(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman•, dan c. aspek lingkungan hidup meliputi pengufangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumberdaya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan Oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa; b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan. 	
<p>BAB X</p> <p>PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK</p>	
<p>Bagian Kesatu</p>	

<p style="text-align: center;">Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.</p> <p>(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan Infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Perumda Tirtayasa dan Penyedia berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Katalog Elektronik; b. Toko Daring; dan c. Pemilihan Penyedia. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengadaan; b. Persiapan Pengadaan; C. Pemilihan Penyedia; c. pelaksanaan Kontrak; d. Serah Terima pekerjaan; e. Pengelolaan Penyedia; dan f. Katalog Elektronik. <p>(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran,</p>	

<p>manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.</p> <p>(3) Sistem pendukung SPSE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Portal Pengadaan Nasional; b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum; d. Pengelolaan peran serta masyarakat; pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan Monitoring dan Evaluasi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.</p> <p>(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar; jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.</p> <p>(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Perumda Tirtayasa.</p> <p>(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tender; atau b. Negosiasi. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	

Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Perumda Tirtayasa menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.</p> <p>(2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh Sistem informasi Pengadaan Barang/JaSa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.</p>	
BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perumda Tirtayasa.</p> <p>(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan/atau kemampuan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p>	

<p>(3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar Sub Bagian Umum.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANRSI, DAN PELAYANAN HUKUM</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengawasan Internal</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Direktur wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Perumda Tirtayasa.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.</p> <p>(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan scrah terima pekerjaan.</p> <p>(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; b. kepatuhan terhadap peraturan; c. pencapaian TKDN; d. penggunaan produk dalam negeri; 	

<p>e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan f. Pengadaan Berkelanjutan.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan Inspektorat Kota Pekalongan.</p> <p>(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengaduan oleh Masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Satuan Pengawasan Internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik,</p> <p>(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada Satuan Pengawasan Internal untuk ditindaklanjuti.</p> <p>(3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya,</p> <p>(4) Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direktur.</p> <p>(5) Direktur melaporkan kepada instansi Yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN Yang merugikan keuangan Perumda Tirtayasa,</p> <p>(6) Direktur memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sanksi</p>	

Pasal 73

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan Yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
- a. menyampaikan dokumen atau ketemngan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Yang ditentukan dalam Dokumen pemilihan ;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia•, atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/Agen Pengadaan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pernenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pernenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

<p>(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi pencairan jaminan; c. sanksi Daftar Hitam; d. sanksi ganti kerugian; dan/atau e. sanksi denda. <p>(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf C dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (Satu) tahun; c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (Satu) tahun; e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 	
<p>Pasal 74</p>	

<p>(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf a ditetapkan Oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/ Agen Pengadaan.</p> <p>(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b ditetapkan Oleh PA atas usulan Pejabat Pengadaan/fim Pengadaan/Agen Pengadaan.</p> <p>(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf c dan Pasal 73 ayat (5) huruf d, ditetapkan Oleh PA atas usulan PPK.</p> <p>(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f ditetapkan Oleh PPK dalam Kontrak sebesar 10,60 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.</p> <p>(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan Yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Tim Pengadaan/Agen Pengadaan; atau mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. <p>(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.</p> <p>(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; b. sanksi Daftar Hitam; c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E purchasing; dan/ atau d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik. <p>(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; b. ayat (q) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama I (satu) tahun; 	
--	--

<p>c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau</p> <p>d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama I (satu) tahun.</p> <p>(5) Peneanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur atas usulan Tim Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PEK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 75 ayat (I) huruf a sampai huruf c, Direktur melaporkan secara pidana.</p>	
	<p>13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.</p> <p>(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur/ pejabat yang berwenang.</p> <p>(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.</p> <p>(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas</p>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.	Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.
Bagian Keempat Daftar Hitam Nasional	
Pasal 78 PA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam kepada unit yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.	
Bagian Kelima Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	
Pasal 79 (1) Perumda Tirtayasa wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyclidikan hingga tahap putusan pengadilan. (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usahayang bertindak sebagai Agen Pengadaan.	
Bagian Keenam Penyelesaian Sengketa Kontrak	
Pasal 80	

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.	
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 81 Direktur dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Walikota ini untuk pengadaan yang dibiayai Perumda Tirtayasa dengan peraturan Direktur.	
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 82 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini: 1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan maka dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Kontrak Yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.	
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 83	

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan uraian barang/jasa, pelaku pengadaan, Agen Pengadaan, perencanaan pengadaan, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Swakelola, pelaksanaan Swakelola, persiapan PengadaRn Barang/Jasa melalui Penyedia, je-nis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, kualifikasi Penyedia; jadwal pemilihan Penyedia, dokumen pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, pengecualian, Tender/ Seleksi Internasional, katalog elektronik, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, sanksi, Daftar Hitam Nasional, layanan penyelesaian sengketa kontrak dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditetapkan dengan Peraturan Direktur paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.</p> <p>(2) Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan dan bagian Yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p> | |
|---|--|

<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran Perumda Tirtayasa, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan dengan peraturan Direktur paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran Perumda Tirtayasa, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan dengan peraturan Direktur paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 November 2023 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd M. SAELANY MACHFUDZ</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 Juli 2024 WALIKOTA PEKALONGAN, ttd ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID</p>

	Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 15 Juli 2024
	SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN ttd NUR PRIYANTOMO
	BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 26